

# **SISTEM PENILAIAN HASIL BELAJAR ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SETTING INKLUSI**

**Oleh : Sukinah\*)**

Pendidikan inklusif merupakan sebuah proses dalam upaya merespon kebutuhan semua peserta didik yang beragam. Berbagai upaya dapat dilakukan melalui perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif berawal dari pendidikan untuk semua tidak diskriminatif terhadap siapapun termasuk di dalamnya anak-anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus bersifat temporer (sementara) maupun permanen sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik termasuk penilaian hasil belajar serta penentuan kenaikan kelas. Implementasi pendidikan setting inklusi tidak semata-mata memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler, tetapi mencakup bagaimana mengkondisikan proses pembelajaran di kelas, sehingga semua peserta didik dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Keberagaman karakteristik peserta didik pada sekolah inklusif tentu membuka peluang adanya sistem penilaian hasil belajar yang sangat variatif dalam menentukan kenaikan kelas. Sistem penilaian hasil belajar bagi anak berkebutuhan khusus selama ini disamakan dengan peserta didik yang lainnya. Ketidakhahaman guru terhadap sistem penilaian hasil belajar dan penentuan kenaikan kelas bagi anak berkebutuhan khusus menyebabkan guru memperlakukan penilaian yang sama dengan peserta didik lainnya. Sistem penilaian yang biasa digunakan dalam menentukan kenaikan kelas peserta didik di sekolah inklusif didasarkan pada ketercapaian kecakapan mental. Sebagian besar anak berkebutuhan khusus tidak dapat naik kelas dikarenakan belum memenuhi standar ketuntasan belajar dan kenaikan kelas yang sudah ditentukan. Dalam setting pendidikan inklusif penilaian hasil belajar secara sistematis dan berkelanjutan bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa di sekolah, mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, dan mengetahui mutu pendidikan pada sekolah. Penilaian yang berkelanjutan berarti melakukan pengamatan secara terus menerus tentang sesuatu yang diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Dalam setting pendidikan inklusif sistem penilaian sekolah diharapkan dengan penilaian yang fleksibel. Sistem penilaian disesuaikan dengan kemampuan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Penilaian fleksibel yang dapat diterapkan melalui dua model yaitu tes yang datanya bersifat kuantitatif maupun kualitatif (portofolio). Dalam upaya pelaksanaan pembelajaran yang ramah bagi semua anak penilaian dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan perbedaan-perbedaan individual.

*Kata kunci : Sistem Penilaian Hasil Belajar, Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan Inklusif*

*\*) Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP UNY*

## **Pendahuluan**

Pemerintah dalam upaya pemerataan layanan pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas bagi semua anak di Indonesia mempunyai makna yang sangat luas dan strategis. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif yang melayani Penuntasan Wajib Belajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Untuk mencerdaskan bangsa yang selaras dengan adanya pesan dari Pendidikan Untuk Semua (*Educational for All*) sekaligus menjadi salah satu usaha meningkatkan partisipasi anak-anak bersekolah (pemerataan kesempatan pendidikan) termasuk anak berkebutuhan khusus. Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki hambatan, kelainan dan/atau memiliki kemampuan potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam layanan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus dalam konsep pendidikan inklusif dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu temporer (sementara) dan permanen (menetap). Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380 /C.66/MN/2003, 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusif bahwa di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sekurang kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara inklusi yaitu di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK masing-masing minimal satu sekolah.

Staub dan Peck (1995) (dalam Sunardi, 2002) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkebutuhan khusus tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkebutuhan khusus, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Sapon-Shevin (O'Neil, 1995) (dalam Sunardi, 2002) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai system layanan

pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.

Dasar filosofi yang digunakan dalam implementasi pendidikan inklusif adalah adanya keyakinan bahwa setiap anak, baik karena gangguan perkembangan fisik/mental maupun cerdas/bakat istimewa berhak untuk memperoleh pendidikan seperti layaknya anak-anak "normal" lainnya dalam lingkungan yang sama. Secara lebih luas, hal ini dapat diartikan bahwa anak-anak "normal" maupun yang dinilai memiliki kebutuhan khusus sudah selayaknya dididik bersama-sama dalam sebuah keberagaman yang ada di dalamnya, sekolah inklusif memainkan peran. Dalam pendidikan inklusif ini mereka tidak semata-mata mengejar kemampuan akademik, tetapi lebih dari itu, mereka belajar tentang kehidupan itu sendiri.

Keberhasilan atau efektif tidaknya suatu proses pendidikan dapat diketahui melalui penilaian, dalam hal ini penilaian yang dilakukan mengarah kepada program yang valid. Penilaian dalam dunia pendidikan menganut prinsip secara terus menerus (berkelanjutan) dan menyeluruh (komprehensif) guna mendukung upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri. Dalam implementasi pendidikan inklusif belum adanya kesamaan persepsi tentang konsep pendidikan inklusif. Apabila kita lihat dari beberapa standar pendidikan yang dibuat pemerintah melalui BSNP pendidikan inklusif hanya diperuntukkan bagi anak-anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras, yang kemampuan intelektualnya tidak berada di bawah rata-rata. Padahal, kenyataan di lapangan prevalensi anak-anak berkebutuhan khusus yang berkemampuan intelektual di bawah rata-rata paling banyak diantara jenis-jenis kelainan yang lain (data Dit PSLB, 2007). Hasil pemetaan anak berkebutuhan khusus di provinsi DIY tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah yang paling banyak dari masing-masing kabupaten adalah anak dengan hambatan belajar intelektual (tunagrahita). Salah satu kabupaten Sleman Anak Berkebutuhan Khusus yang paling banyak berdasarkan jenis kekhususannya adalah anak tunagrahita sebanyak 1.299 anak terdiri 855 anak yang bersekolah di SLB, 222 anak bersekolah di sekolah inklusif dan 222 anak yang belum bersekolah (Team jurusan PLB FIP UNY, 2011). Berdasarkan hasil diskusi dengan guru-guru dan kepala sekolah penyelenggara

sekolah inklusif peserta pelatihan di Yogyakarta tahun 2009 (Ishartiwi, 2010) teridentifikasi permasalahan-permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusif salah satunya adalah belum adanya sistem evaluasi hasil belajar (baik formatif dan sumatif). Sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki format penilaian terhadap peserta didiknya sendiri sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Beberapa waktu yang lalu penulis mengadakan wawancara berkaitan penilaian hasil belajar di dua sekolah yang mengimplementasikan pendidikan inklusif menunjukkan hasil yang berbeda. Guru sekolah pertama mengatakan bahwa "penilaian belajar disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak, dan tidak ada anak yang tunggak kelas, mereka berkembang sesuai dengan usia teman sebayanya". Sedangkan pendapat guru sekolah kedua mengemukakan "anak-anak yang memiliki kemampuan mengikuti kurikulum reguler penilaian ikut kelas, sedangkan anak-anak yang kemampuan akademik di bawah, soal dan penilaiannya disesuaikan dengan kemampuan anak dan KKM nya pun berbeda".

Adanya peraturan-peraturan sistem penilaian hasil belajar yang dibuat pemerintah yang kontradiksi dengan sistem penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif, pelaksanaan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif di sekolah reguler menjadi tantangan (permasalahan). Banyak pihak (siswa, orang tua, dan masyarakat) yang merasa tidak sesuai dan tidak adil bagi anak pada umumnya dengan penilaian yang dilakukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler. Contohnya sewaktu penulis melakukan observasi di salah satu sekolah implementasi pendidikan inklusif diperoleh informasi bahwa penilaian dalam setting pendidikan inklusif belum dipahami oleh para guru seperti apa wujud yang sebenarnya serta diperoleh informasi pula bahwa sistem kenaikan kelas anak berkebutuhan khusus naik terus, tetapi untuk anak pada umumnya ada yang tidak naik kelas. Hal ini menimbulkan kecemburuan anak pada umumnya, orang tua siswa dan masyarakat. Akhirnya anak-anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata kelas sebelum adanya kenaikan kelas diberikan peringatan oleh pihak sekolah akan tetap berlanjut di sekolah dengan tidak naik kelas, atau pindah sekolah dengan diberikan nilai naik kelas.

Masih adanya banyak permasalahan berkaitan dengan implementasi pendidikan setting inklusif menunjukkan perlu penataan yang secara komprehensif terutama dalam sistem penilaian hasil belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Praktek-praktek pendidikan yang terlihat dan masih diterapkan pada sebagian besar sekolah inklusif di Indonesia masih berpihak pada keseragaman yang bertolak belakang dengan prinsip pendidikan inklusif yang menghargai keberagaman peserta didik. Contoh dari praktek tersebut sudah terlihat sejak penerimaan siswa baru dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, menentukan kenaikan kelas, kelulusan sekolah dan melakukan beragam tes-tes kelayakan untuk menjadi siswa pada sekolah tersebut.

### **Implementasi Pendidikan Setting Sekolah Inklusif**

Pendidikan Inklusif merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis. Pendidikan inklusif didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam layanan pendidikannya. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. (Skortjen, 2001)

Menurut Ditpslb (2007) pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna yaitu: (1) Pendidikan Inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak, (2) Pendidikan inklusif berarti memperoleh cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar, (3) Pendidikan inklusif membawa makna bahwa anak mendapat kesempatan untuk hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam

hidupnya, dan (4) Pendidikan inklusif diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Dalam implementasi pendidikan inklusif memiliki ciri-ciri pokok : Mengakomodasi semua anak (tidak diskriminatif), sistem sekolah disesuaikan dengan kebutuhan anak, anak belajar bersama-sama dengan kelompok umur sebaya, masalah terletak pada sistem bukan pada anak, setiap anak mendapat keuntungan dari sekolah yang sama, dan pembelajaran berlangsung dalam atmosfer yang lebih menyenangkan (UNESCO, 2003) . *Positive attitude* guru dan teman terhadap Anak berkebutuhan khusus dan Guru Pembimbing Khusus dapat Menciptakan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan, kooperatif, partisipatif dan kolaboratif; dan mengembangkan perilaku positif siswa melalui *class meeting* dan *action plan* (Loreman, Deppeler & Harvey, 2005)

Implementasi pendidikan inklusif memiliki sisi positif yaitu dapat membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi, semua anak pada setiap sistem dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah, mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran, melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Kegiatan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif harus berpusat kepada anak (*child centered*), anak harus aktif belajar (*active learning*). Untuk itu dalam implementasi pendidikan inklusif seharusnya lebih memfokuskan dalam kegiatan pembelajaran yang secara berkelanjutan selalu ditingkatkan kualitasnya. Menurut Depdiknas, UNESCO, dan UNICEF (2003) bahwa kegiatan pembelajaran harus aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Kegiatan Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) merupakan suatu tuntutan atau keharusan untuk dilaksanakan dan sesuai dengan setting pendidikan inklusif.

Proses layanan pembelajaran dalam pendidikan setting inklusi bukan didasarkan pada bentuk layanan sama rata, sama rasa dan disampaikan secara klasikal, tetapi

diarahkan pada pembelajaran yang lebih demokratis dan proporsional sesuai dengan harapan dan target belajar dari masing-masing kelompok anak tersebut, dan proses belajar anak-anak tersebut tidak dipisahkan berdasarkan kelompok atau dipisahkan dari komunitasnya, melainkan mereka belajar bersama-sama dengan teman sebayanya di dalam kelas reguler (Hidayat,2009). Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah menerima keberagaman serta menghargai adanya perbedaan, sekolah harus siap mengelola kelas yang heteogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual, guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif, guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta guru dituntut melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses pendidikan.

Kehadiran dan inklusifnya anak berkebutuhan khusus di sekolah setting inklusi dalam tatanan proses belajar mengajar akan berdampak pada proses perubahan kelas. Selain dihadapkan pada kelas klasikal guru juga diberikan tanggung jawab baru untuk mendidik, membina dan membimbing dan mengajarkan materi dengan keberagaman kebutuhan siswa (Hidayat : 2009). Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah mereka yang mempunyai kebutuhan, baik permanen maupun sementara, yang disebabkan oleh kondisi sosial-emosi, dan/atau, kondisi ekonomi dan/atau, kondisi politik dan/atau, kelainan bawaan maupun yang didapat kemudian. Dengan kata lain, kita tidak hanya membicarakan kelompok minoritas yang disebabkan oleh kelainan saja, tetapi mencakup sejumlah besar anak yang sekolah.

### **Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik di Sekolah Inklusif**

Pendidikan sebagai upaya inklusif lebih bersifat melihat perkembangan individu secara menyeluruh sambil tetap memperhatikan perkembangan perilaku intelektual dan sosial individu sebagai produk dari belajarnya (*child centered*). Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak lainnya. Pembelajaran secara individual pada dasarnya merupakan pembelajaran untuk semua anak, termasuk program untuk anak berkebutuhan khusus yang mempunyai kelambanan

dalam perkembangannya, mengalami gangguan emosional, dan anak yang memiliki cacat fisik atau mental. Setiap anak diberi kebebasan untuk memilih materi pembelajaran yang diinginkannya dan memperoleh materi yang berbeda-beda.

Setiap kegiatan belajar mengajar harus memiliki tujuan yang perlu dinilai dengan berbagai cara. Penilaian harus menjabarkan hasil belajar, yaitu memberikan gambaran mengenai keberhasilan siswa dalam mengembangkan serangkaian keterampilan (psikomotor), pengetahuan (kognitif), dan perilaku (afektif) selama pembelajaran, topik atau kurikulum yang fleksibel. Untuk mengetahui ketercapaian kompetensi setiap siswa maka peranan penilaian sangat besar artinya. Dalam setting pendidikan inklusif penilaian hasil belajar secara sistematis dan berkelanjutan bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa di sekolah, mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, dan mengetahui mutu pendidikan pada sekolah. Penilaian (Assessment) dapat dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mendapatkan data tentang baseline setiap anak sebelum pembelajaran dilakukan oleh guru. Pada saat pembelajaran berlangsung untuk melihat apakah anak mengalami hambatan, melihat respon anak thd proses, dan melihat atmosfir kelas (LIRP). Pada akhir pembelajaran untuk melihat perkembangan yang terjadi.

Adapun fungsi dari penilaian (Assessment) meliputi *Screening & Identification* (penyaringan dan penjaringan), *Child's Educational Needs exploration* (eksplorasi kebutuhan belajar anak) dan *Intructional Planning* (perencanaan pembelajaran) serta *Evaluation* (penilaian hasil). Dalam *Screening* dan *identification* dilakukan untuk mendapatkan data siapakah anak yang mengalami hambatan belajar (memiliki kebutuhan khusus) baik yang bersifat internal baik kebutuhan khusus karena factor diri anak itu sendiri (kecacatan atau keberbakatan) maupun bersifat eksternal, kebutuhan khusus akibat sistem/lingkungan. Sedangkan fungsi dalam eksplorasi kebutuhan belajar anak untuk mendapatkan data tentang apa yang sudah dikuasai anak saat ini, apa yang menjadi hambatan bagi anak untuk belajar dan apa yang menjadi kebutuhan belajarnya.

Penilaian yang berkelanjutan berarti melakukan pengamatan secara terus menerus tentang sesuatu yang diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik.



Observasi ini dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun, misalnya awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Penilaian yang berkelanjutan bisa juga dilakukan melalui: observasi, portofolio, bentuk ceklist (keterampilan, pengetahuan, dan perilaku), tes dan kuis, dan penilaian diri serta jurnal reflektif. (Direktorat PLB, Braillo Norway dan UNESCO: 2003).

Untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan hasil belajar siswa selama program pendidikan maka sistem penilaian yang dilaksanakan harus komprehensif dan fleksibel. Dalam setting pendidikan inklusif, sistem penilaian yang diharapkan di sekolah yaitu sistem penilaian yang fleksibel. Penilaian disesuaikan dengan kompetensi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Penilaian yang fleksibel memiliki dua model, yaitu dengan tes yang datanya bisa kuantitatif dan kualitatif, salah satu contohnya portofolio. Penerimaan siswa tanpa tes serta ujian dilakukan secara lokal bagi tingkat dasar dengan model sistem kenaikan kelas otomatis. Dengan demikian, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk menuju cara melaksanakan proses pembelajaran yang ramah bagi semua siswa, karena proses pembelajarannya senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap siswa. (Sunanto *et all.* ,2004:86-87). Hal ini selaras dengan pendapat Budimansyah (2002:114) sebagai berikut "Penilaian yang baik hendaknya memperhatikan kondisi dan perbedaan-perbedaan individual (*individual differences*)."

Penilaian (assessment) merupakan penafsiran hasil pengukuran dan pencapaian hasil belajar. Data hasil belajar diperoleh melalui pengukuran dan penilaian pendidikan merupakan informasi yang sangat berguna sebagai umpan balik bagi pelaksanaan pengajaran dan strategis proses belajar-mengajar. Penilaian dalam proses (*lebih bersifat assessment*), dapat mengungkapkan hambatan belajar yang dialami siswa pada saat pembelajaran berlangsung, sementara penilaian di akhir pelajaran dapat melihat apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai atau tidak. Proses penilaian yang berkelanjutan dimulai sejak keterlibatan anak di kelas secara administrative di sekolah mencerminkan adanya pengakuan terhadap keberagaman karakteristik peserta didik. Hasil proses penilaian tersebut kemudian dijadikan bahan acuan dalam pembuatan dan implementasi kurikulum, sehingga kebutuhan belajar masing-masing peserta didik

dapat diakomodasi oleh keberagaman aspek-aspek yang terkandung dalam kurikulum. Salah satu kunci sukses dalam belajar mengajar adalah kurikulum. Dalam penilaian peserta didik diberi kesempatan untuk berprestasi sesuai kemampuannya sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Hal yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan aktivitas penilaian pembelajaran (Muslich, 2008: 92) adalah:

1. Memandang penilaian sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran.
2. Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendorong dan memperkuat proses penilaian sebagai kegiatan refleksi (bercermin diri dan pengalaman belajar).
3. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar siswa.
4. Mengakomodasi kebutuhan khusus siswa.
5. Mengembangkan sistem pencatatan yang menyediakan cara yang bervariasi dalam pengamatan belajar siswa.
6. Menggunakan penilaian dalam rangka mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat pencapaian siswa.

Menurut Thorndike dan Hagen (1977) tujuan dan kegunaan penilaian pendidikan dapat diarahkan kepada keputusan-keputusan yang menyangkut (1) pengajaran (2) hasil belajar (3) Diagnosis dan usaha perbaikan (4) penempatan (5) seleksi (6) bimbingan dan konseling, (7) kurikulum, dan (8) penilaian kelembagaan. Pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran seseorang dengan hasil pengukuran yang diperoleh orang – orang lain dalam kelompoknya, dinamakan Penilaian Acuan Norma (Norm – Referred Evaluation). Dan pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran seseorang dengan patokan “batas lulus” yang telah ditetapkan, dinamakan penilaian Acuan Patokan (Criterion – referred Evaluation).

Penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus sangat beragam. Jenis dan model yang akan dipakai disesuaikan dengan kompetensi dan indikator hasil belajar yang ingin dicapai, tipe materi pembelajaran, dan tujuan penilaian itu sendiri. Ada dua jenis penilaian yaitu tes dan non-tes. Tes meliputi kegiatan tes lisan, tes tulis (uraian dan objektif), dan tes kinerja. Sedangkan non-tes meliputi skala sikap, checklist,

kuesioner, studi kasus, dan portofolio. Keragaman penilaian tidak dimaksudkan memberikan keleluasaan guru untuk menerapkan dengan seenaknya jenis penilaian tertentu. Sebaliknya dengan adanya keragaman penilaian tersebut, guru dituntut lebih profesional dan bertanggung jawab ketika menentukan pilihan. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan (*continuous evaluation*) agar dapat mendorong penelaahan dan refleksi siswa terhadap kemampuan siswa dalam melakukan pembelajaran dan hasil yang dicapainya. Artinya ini merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan secara terus menerus dan tidak berhenti serta terfokus pada ujian akhir saja, namun semua proses dilihat secara seksama, sehingga guru memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi belajar siswa dari awal sampai akhir. Agar setiap siswa memperoleh perhatian yang sama tetapi diberi yang berbeda sesuai kebutuhannya, maka guru menyusun buku penilaian individu yang berisi rangkuman seluruh hasil belajar siswa (hasil tes, hasil tugas perorangan, hasil praktikum, hasil pekerjaan rumah, dsb.) tercatat dan terorganisir secara sistematis (Sunanto *et al.*, 2004:87).

Penilaian bukan menghakimi siswa, tetapi untuk mengetahui perkembangan pengalaman belajar siswa. Untuk itu kegiatannya dilakukan secara komprehensif dan seimbang antara penilaian proses dan hasil. Posisi guru sebagai *constructive evaluators* yang merefleksikan bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa menghubungkan apa yang mereka ketahui dengan berbagai konteks, dan bagaimana perkembangan belajar siswa dalam berbagai konteks belajar. Melalui penilaian siswa memperoleh kesempatan untuk dapat mengembangkan penilaian diri (*self assessment*) dan penilaian sesama (*peer assessment*). Penilaian mengukur keterampilan dan performansi dengan kriteria yang jelas (*performance-based*) dengan berbagai alat secara berkesinambungan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Siswa, orang tua, dan sekolah memperoleh manfaat dari kegiatan penilaian untuk mendiagnosis kesulitan belajar, umpan balik pembelajaran, dan/atau untuk menentukan prestasi siswa. Penilaian (Assessment) dilakukan sesuai dengan kemampuan anak.

Penggunaan strategi dan instrumen penilaian yang positif yang sesuai dengan konsep penilaian hasil belajar dalam setting inklusif misalnya observasi, portofolio, dan unjuk kerja (*performance*). Penilaian hasil belajar siswa secara berkelanjutan, adil,

melakukan penilaian dalam situasi formal dan informal, melaksanakan penilaian terbuka dan dilakukan secara menyenangkan, mencatat hasil penilaian secara teratur dan menentukan keputusan tentang hasil belajar siswa berdasarkan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan komprehensif. Penilaian hasil belajar atau kemajuan siswa yang memuat rincian hasil belajar berdasarkan kriteria yang ditentukan disesuaikan dengan kebutuhan/kompetensi agar orang tua dalam memahami makna. (Dedi, 2006). Laporan hasil belajar informasinya jelas, menyeluruh dan akurat serta menjamin orang tua untuk segera mengetahui masalah dan perkembangan anaknya memaknai dan melakukan sistem kenaikan kelas secara lebih bijaksana dengan memperhitungkan segala resiko atau sebab akibat dari keputusan naik kelas atau tidak naik kelas hal ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ramah bagi semua siswa.

Penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif harus fleksibel, dilakukan secara berkelanjutan, autentik dan komprehensif. Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kompetensi/kebutuhan khusus setiap individu/anak. Untuk menentukan ketuntasan belajar (*mastery learning*) atau standar kompetensi kelulusan untuk setiap individu/anak maka diperlukan adanya beberapa standar ketuntasan belajar/kelulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap individu.

Perencanaan penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif dibuat perencanaan penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kompetensi atau kebutuhan khusus setiap individu/anak. Penentuan ketuntasan belajar (*mastery learning*) atau standar kompetensi kelulusan untuk setiap individu/anak maka diperlukan adanya beberapa standar ketuntasan belajar/kelulusan. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah serta kesiapan guru dalam penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif, maka standar yang direkomendasikan untuk setiap individu/anak (anak pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus) yaitu adanya standar bagi setiap individu yang sangat cepat, cepat, cukup/sedang, kurang cepat, dan tidak cepat dalam perkembangan individu/anak atau tingkat perolehan hasil belajarnya.

Hasil penelitian (Dedi Kustawan, 2006) cara melaksanakan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif :

- a. Melakukan asesmen awal, tengah dan akhir,
- b. Melakukan penilaian hasil belajar secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran,
- c. Melakukan penilaian hasil belajar dalam suasana yang menyenangkan,
- d. Berupaya memberikan profil kemampuan siswa secara lengkap/menyeluruh meliputi aspek kognitif, apektif dan psikomotorik,
- e. Melakukan penilaian hasil belajar dengan adil disesuaikan dengan kemampuan /kebutuhan khusus setiap individu/siswa,
- f. Melakukan penilaian hasil belajar berkelanjutan (melakukan pengamatan secara terus menerus),
- g. Menggunakan strategi yang mencerminkan kemampuan siswa secara autentik (hasilnya akurat),
- h. Melakukan penilaian hasil belajar dengan menggunakan tes tertulis, observasi, melalui portifolio (kumpulan kerja siswa), unjuk kerja, produk, penugasan dan lain-lain,
- i. Mengadministrasikan penilaian hasil belajar secara tepat dan efisien, antara lain adanya catatan anekdot, buku nilai yang memuat observasi, unjuk kerja, portofolio (dokumentasi ulangan harian, ulangan blok, dan ulangan umum), dokumentasi penilaian tugas terstruktur, dokumentasi penilaian perilaku harian , dan dokumentasi penilaian laporan aktivitas di luar sekolah, serta jurnal reflektif.
- j. Adanya penyesuaian-penyesuaian dalam teknik/cara/strategi dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. Misalnya untuk siswa gangguan penglihatan pada waktu pelaksanaan penilaian hasil belajar perlu menggunakan riglet, pen, tape recorder, mesin tik Braille, dan loop. Jika ada tes lisan, maka untuk siswa dengan gangguan pendengaran perlu adanya keterarah wajahan dan penggunaan membaca ujaran atau membaca bibir (*lip reading*), dan guru kalau berbicara harus jelas dan gerakan mulut pelan-pelan agar dapat dipahami/dimengerti oleh siswa, atau bahkan saat tertentu dengan menggunakan bahasa isyarat.

k. Adanya penyesuaian-penyesuaian perangkat/instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap individu/anak. Misalnya untuk anak gangguan penglihatan (blind), perangkat/instrumen penilaian hasil belajarnya dengan menggunakan huruf Braille. Dan bagi yang masih mempunyai sisa penglihatan (low vision), tulisannya dapat diperbesar sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Hidayat (2009) dampak negatif bagi anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan soal yang tidak relevan dengan kompetensinya adalah sebagai berikut:

- a. Motivasi dan semangat mereka untuk mengikuti ujian menjadi menurun karena mendapat soal ujian yang belum dipahami.
- b. Mereka memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan soal-soal yang baru dikenalnya.
- c. Konsentrasi, atensi, dan rasa percaya diri mereka menjadi berkurang, sehingga potensi dan kemampuan belajar yang telah dikuasainya tidak dapat diwujudkan secara optimal.
- d. Peluang anak berkebutuhan khusus untuk mencapai standar kelulusan relatif kecil.

Idealnya bahan ujiannya yang harus menyesuaikan pada kondisi, kompetensi, dan program belajar anak berkebutuhan khusus.

Dalam menyusun laporan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif (Dedi Kustawan, 2006) :

- a. Hasil akhir untuk siswa berhubungan dengan apa yang dapat siswa lakukan sebelumnya dan apa yang dapat dilakukannya sekarang (Mengacu pada perkembangan siswa).
- b. Keputusan tingkat pencapaian hasil belajar berdasarkan berbagai informasi.
- c. Keputusan tentang kemampuan siswa mempertimbangkan hasil kerja atau karya siswa yang dikumpulkan.
- d. Menggunakan sistem pencatatan yang bervariasi.
- e. Adanya penyesuaian sistem laporan penilaian hasil belajar yang memuat rincian hasil belajar berdasarkan standar/kriteria yang telah ditentukan, memberikan informasi yang jelas, menyeluruh dan akurat, dan menjamin orangtua untuk segera mengetahui masalah dan perkembangan anaknya. (Melalui diskusi formal,

buku/kartu laporan penilaian hasil belajar atau rapor, pertemuan guru dan orang tua).

Dalam penilaian perlu adanya adaptasi yang meliputi adaptasi dalam cara, adaptasi dalam waktu, adaptasi dalam isi, adaptasi dalam cara waktu dan isi. Penilaian dilakukan oleh pendidik (guru) bahwa setiap anak mendapat penilaian tentang aspek social emosional, fisik motorik dan perilaku adatif dan kompetensi akademik. Dalam adaptasi cara, waktu, isi (salah satu atau semuanya) dapat dilaporkan secara kuantitatif maupun deskriptif kualitatif. Penilaian oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran (naik kelas/pindah kelas) dan setiap akhir program satuan pendidikan (tamat sekolah/lulus).

Ujian nasional wajib diikuti oleh anak-anak reguler sedangkan anak berkebutuhan khusus tidak diwajibkan mengikutinya. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kecerdasan berbeda-beda ada yang di bawah rata-rata seperti tunagrahita, slow learners namun ada juga di atas rata-rata. Saat kelulusan sekolah anak berkebutuhan khusus hanya akan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar selama enam tahun untuk melanjutkan ke sekolah inklusif jenjang berikutnya. Anak berkebutuhan khusus tidak ada hubungannya dengan ujian standar kelulusan setiap tahun ajaran. Apabila hasil belajar anak dalam kelompok usia teman sebayanya mungkin akan memiliki setidaknya tiga tahun perbedaan dalam hal kemampuan umum dan kemampuan science bisa sampai enam atau delapan perbedaannya. Apabila kita membandingkan antara kemampuan anak dengan tes yang telah distandardisasi sebenarnya tidak adil untuk semua anak dikarenakan mereka yang kemampuan akademisnya jauh di bawah rata-rata kelasnya dan ada yang kecerdasannya sangat jauh di atas teman-teman sebayanya. Kita tidak boleh menekankan pada kelemahan atau kekurangan anak, namun harus menayakan apa yang telah dicapai anak dan menentukan bagaimana kita dapat membantu mereka untuk belajar lebih banyak lagi. Dengan disertai penilaian autentik dan berkelanjutan, maka guru dapat mengidentifikasi apa yang telah dipelajari dan dikuasai anak didik serta beberapa penyebab mengapa siswa tidak termotivasi belajar dan menyelesaikan soal ujian. Guru mengadaptasi perencanaan dan

pengajarannya sesuai fase perkembangan belajar siswa, sehingga semua siswa akan mendapatkan peluang untuk belajar dan sukses.

## **Penutup**

Pendidikan inklusif merupakan salah satu upaya perwujudan penuntasan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Pendidikan inklusif lebih terfokus pada setiap kelebihan yang dibawa peserta didik ke sekolah daripada kekurangan mereka yang nampak dan secara khusus melihat pada bidang spesifik mana anak-anak dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi dalam kehidupan normal masyarakat atau sekolah, atau memperhatikan apakah mereka memiliki hambatan fisik dan sosial karena lingkungan yang tidak kondusif. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan terhadap kemampuan siswa itu sendiri berdasarkan hasil observasi kemampuan-kemampuan sebelumnya dan secara berkelanjutan. Penilaian dapat dilaksanakan pada saat awal, tengah dan akhir kegiatan pembelajaran. Idealnya bahan ujiannya yang harus menyesuaikan pada kondisi, kompetensi, dan program belajar anak berkebutuhan khusus.

Penilaian yang berkelanjutan bisa juga dilakukan melalui: observasi, portofolio, bentuk ceklist (keterampilan, pengetahuan, dan perilaku), tes dan kuis, dan penilaian diri serta jurnal reflektif.

Pemahaman guru mengenai sistem penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif maka disarankan agar guru dapat lebih memahami kembali makna konsep penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif. Pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca buku referensi yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif, berdiskusi dengan teman guru di sekolah, konsultasi ke Guru Pembimbing Khusus, dan mengikuti *in house training*, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, workshp atau mengikuti kegiatan lainnya

## **Daftar Pustaka**

Budimansyah D. (2002). *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Genesindo



- Dedi Kustawan, (2006), *Penilaian Hasil Belajar di Sekolah Uji Coba Implementasi Pendidikan Inklusif (Studi kasus tentang penilaian hasil belajar oleh guru di sekolah uji coba implementasi pendidikan inklusif SDN X di kota Sukabumi)*, Thesis, UPI, Bandung
- Direktorat PSLB (2007), *Suplemen Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*, Jakarta,
- Direktorat PSLB (2007) *Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (reposisi, redifferensiasi, rebranding)*, materi pengantar, dipresentasikan dalam berbagai program kegiatan Direktorat PSLB
- Hidayat, (2009), *Model dan Strategi Pembelajaran ABK dalam Setting Pendidikan Inklusif*, Makalah Workshop, Balikpapan
- Ishartiwi, (2010), *Implementasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional*, JPK PLB FIP UNY, Yogyakarta
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 002/U/1986, *Wajib Belajar Sembilan tahun*, Jakarta
- Loreman, T., Deppeler, J., & Harvey, D. (2005). *Inclusive education: a practical guide to supporting diversity in the classroom*, NSW: Allen & Unwin
- Muslich, Masnur. (2008). *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Skjorten, MD. (2001). *Towards Inclusion, Education-Special Needs Education An Introduction*. Oslo: Unipub forlag.
- Sunanto Dj. *et all.* (2004). *Pendidikan yang Terbuka bagi Semua*. Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan UNESCO Jakarta Office.
- Sunardi, (2002), *Kecenderungn dalam Pendidikan Luar Biasa*, Dikti, Depdikbud, Jakarta
- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380 /C.66/MN/2003, 20 Januari 2003
- Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- UNESCO, (2003). *Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education*. Paris: UNESCO